

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Globalisasi telah membawa manusia ke tatanan dunia baru, yang semula dunia dihadapkan pada sistem yang *bipolar* kemudian beralih kepada sistem *unipolar* yang mengedepankan aspek ekonomi ketimbang militer. Semenjak perang dingin usai nampaknya pasar mulai mendominasi negara. Ekonomi menjadi grand narrative baru dalam hubungan internasional setelah politik dan pertahanan keamanan-sebagai grand narrative lama tidak lagi relevan secara konstektual. Kapitalisme dan Liberalisme menjadi ideologi utama masyarakat dunia. Dalam konteks perdagangan dunia, GATT menemukan momentumnya hingga di tahun 1995 berubah menjadi World Trade Organization (WTO), sebuah organisasi yang akan meneguhkan dan memformalkan seluruh kesepakatan dalam GATT baik dari putaran Uruguay yang kesemuanya tentu saja berisi agenda-agenda yang melapangkan proses liberalisasi perdagangan dunia<sup>1</sup>. Hal tersebut yang mendorong perdagangan bebas saat ini. Akibat hal tersebut di atas, maka hampir seluruh negara yang berada di benua-benua mengintegrasikan diri dalam sebuah bentuk atau forum organisasi yang menitikberatkan pada kerjasama ekonomi kedalam satu kawasan atau lebih.

---

<sup>1</sup> Winner Agung Pribadi, *Unfair Trade dalam Free Trade : Standar Ganda Negara-negara Maju dalam Penerapan Agreement (AoA) WTO*, Jurnal Ilmu hubungan Internasional volume II/ 1 Mei 2005, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hal 200

Hal tersebut diatas Sesuai dengan pernyataan Ernest Haas:

*“Proses dengan mana aktor-aktor politik di beberapa wilayah nasional yang berbeda terdorong untuk memindahkan kesetiaan, harapan, dan kegiatan politik mereka ke suatu pusat baru yang lembaga-lembaganya memiliki atau menuntut yuridiksi atas negara-negara nasional yang ada sebelumnya<sup>2</sup>”.*

Forum-forum tersebut beraneka ragam jenis dari yang berdasarkan region (kawasan), berdasarkan kesamaan jenis barang ekspor-impor, hingga negara yang tergolong penerima bantuan dari negara donor, dan lain sebagainya. Forum-forum tersebut sangat berperan penting bagi pembentukan sistem unipolar yang menginginkan tatanan kehidupan yang damai, tenteram dengan stabilitas keamanan yang terkendali sehingga dunia tidak lagi memfokuskan pada konflik peperangan namun untuk lebih mempererat kerjasama demi kepentingan ekonomi dalam suatu komunitas.

WTO merupakan forum organisasi terbesar dan terluas yang melibatkan peran dan tugas dibawah naungan PBB namun forum tersebut tidak seperti yang diharapkan oleh negara-negara anggotanya. Kemacetan perundingan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) V WTO di Cancun Meksiko menandai forum WTO tersebut kurang aspiratif terhadap kepentingan negara-negara berkembang (dunia ketiga). Akibatnya banyak negara lebih cenderung untuk membentuk forum kerjasama yang lebih kecil yang mana hanya melibatkan beberapa negara saja, tetapi negara-negara anggota tersebut masih merupakan anggota tetap WTO karena telah terikat dengan “Agreement Esthabilising The world Trade

---

<sup>2</sup> Ernest Haas, *How Nations Come to Agree: A Study of International Decision Making*, 1950, Jakarta 1990

Organization”, termasuk Indonesia. Terbitnya Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tanggal 2 November tentang pengesahan (ratifikasi) tersebut diatas, maka Indonesia telah resmi menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada didalamnya menjadi sah menjadi bagian dari legalisasi nasional. Menjadi anggota WTO berarti terikat dengan adanya hak dan kewajiban. disamping itu pula, WTO bukan hanya menciptakan peluang (oppurtunity), tetapi juga ancaman(threat)<sup>3</sup>.

Forum-forum lainnya yang berdasarkan kesamaan kawasan (*region*), seperti *Europe Economic Community* (ECC) atau yang lebih dikenal Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) merupakan forum kerjasama yang dicetuskan oleh sebagian besar negara-negara di Eropa Barat. Pada perkembangannya MEE ini berkembang pesat hingga kepada penyatuan mata uang Eropa yang memiliki nilai tukar dan tekan terhadap Dollar Amerika. Di dataran benua Asia, beberapa negara memperhatikan hal tersebut dan menginginkan untuk mengintegrasikan diri seperti halnya MEE. Keinginan tersebut tercetus pada ASEAN *Converned a Special Senior Economic Official Meeting (Special SEOM)* di Bandung, Indonesia, pada tanggal 15-16 Maret 1991. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan tentang penyatuan negara-negara di Asia kedalam sebuah group yaitu *East Asia Economic Group (EAEG)*. Forum EAEG adalah cikal bakal dari East Asia Community, selanjutnya dalam penulisan ini disingkat EAC. Forum EAC juga menarik keinginan beberapa negara tetangga, seperti Australia untuk bergabung sebagai anggota. Keinginan tersebut disampaikan pada pertemuan

---

<sup>3</sup>Dimodi: Diktat *Introduction to INTERNATIONAL TRADE & BUSINESS* UNIV. Yogyakarta

Perdana Menteri Australia, John Howard dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Canberra<sup>4</sup>

Meleburnya Jepang, Cina dan Korea Selatan, yang merupakan negara dengan tingkat perkonomian yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN, ke dalam forum ASEAN sehingga terbentuk forum baru EAC akan menimbulkan kesenjangan dan dominasi diantara negara-negara EAC lainnya. Bentuk kesenjangan dan dominasi tersebut muncul karena adanya persaingan dari masing-masing negara demi tercapainya kepentingan *nasional (national interest)* dalam forum tersebut. Seperti pernyataan Morgenthau, kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain<sup>5</sup>. Namun demikian secara struktural posisi masing-masing negara dalam kerjasama regional ini adalah sejajar tidak ada yang lebih ditinggikan dibandingkan negara lainnya

Tahun 1997 negara-negara di kawasan Asia mengalami krisis ekonomi yang parah dan berkepanjangan di beberapa negara tertentu. Forum EAC diharapkan mampu mendorong perekonomian di kawasan Asia Tenggara, dan memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia serta sebagai jembatan menuju kepada kemajuan dalam segala aspek kehidupan, tidak hanya pada aspek ekonomi belaka. Hal terpenting dari penjelasan diatas adalah bagaimana Indonesia menempatkan diri dalam forum tersebut dan perannya

Ketertarikan penulis untuk menganalisa lebih lanjut mengenai Indonesia menempatkan diri sebagai aktor yang memiliki andil dalam forum *East Asia Community* demi kepentingan nasionalnya, menjadi judul:

*"Antisipasi Indonesia dalam Menghadapi East Asia Community"*

## **B. Tujuan Penulisan**

Sebuah penelitian ilmiah senantiasa memiliki tujuan penulisan dalam penelitian tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

Pertama, penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat guna sekaligus memberikan gambaran tentang EAC.

Kedua, penulisan ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran terhadap perkembangan hubungan antar negara-negara di kawasan Asia Timur, menyangkut hubungan ekonomi di kawasan Asia Timur, menuju kepada pembentukan EAC.

Ketiga, untuk menjelaskan upaya Indonesia agar dapat berperan dalam menghadapi forum EAC sehingga melalui forum tersebut Indonesia dapat mengakomodir kepentingan nasionalnya.

Keempat penulisan ini bertujuan sebagai tugas akhir program Strata-1 yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas

### C. Latar Belakang Masalah

Pembentukan EAC memberikan dampak yang besar tidak hanya pada perekonomian di kawasan Asia Timur namun juga di seluruh dunia. Dampak tersebut terutama menyangkut perdagangan dan perekonomian dunia, dimana melalui forum kerjasama tersebut akan semakin mempercepat arus barang dan jasa antar kawasan di Asia Timur khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya. Forum EAC juga diharapkan mampu mengakomodir segala kebutuhan masyarakat dunia. Hal tersebut di atas semakin menandakan betapa jelasnya sistem globalisasi dan perdagangan bebas telah merambah segala penjuru dunia.

Proses pembentukan EAC ini dikarenakan kemajuan yang dicapai oleh forum ASEAN menyangkut sistem perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara sehingga menarik perhatian bagi beberapa negara wilayah di kawasan Asia, seperti Cina, Jepang, Korea Selatan yang kemudian turut bergabung dalam forum kerjasama tersebut diatas.

Masuknya ketiga negara tersebut diatas memiliki andil yang cukup positif demi kemajuan perdagangan dan perekonomian di kawasan Asia Timur. Negara-negara tersebut memiliki kekuatan serta potensi yang besar dalam hal ekonomi, dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya. Ketertarikan tersebut menimbulkan keinginan untuk membentuk sebuah forum *East Asia Community*. Masuknya aktor-aktor tersebut dalam menjadi satu dalam Forum EAC akan membawa dampak yang sangat berarti bagi peningkatan perdagangan dan perekonomian di kawasan Asia. Penggabungan dari Forum ASEAN dan ketiga negara tersebut diatas tidak mudah yang dibayangkan Forum ASEAN

harus memikirkan prospek dari *join committe* tersebut, khususnya Indonesia yang secara perekonomiannya masih lemah dibandingkan dengan beberapa negara anggota ASEAN lainnya termasuk ketiga negara tersebut diatas. Bertolak dari keadaan Indonesia yang demikian muncul suatu persoalan baru mengenai kapabilitas Indonesia untuk menjadi aktor yang dapat berperan baik dan memiliki andil serta mampu diperhitungkan dikancah perekonomian dan perdagangan di kawasan Asia yang tergabung dalam EAC, selain itu melalui forum tersebut diharapkan segala aspirasi dan kebutuhan Indonesia demi kepentingan nasionalnya dapat tercapai.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Bertolak dari latar belakang masalah diatas, kemudian timbul pertanyaan:

“Bagaimana antisipasi Indonesia dalam menghadapi forum EAC sehingga melalui forum tersebut Indonesia dapat mengakomodir kepentingan nasionalnya? “

#### **E. Kerangka Dasar Pemikiran**

Untuk membantu penulis memahami dan menganalisa tentang masalah faktor-faktor pendorong pembentukan (*East Asian Community*) tersebut, digunakan suatu analisa berupa kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Pada penelitian ini penulis menggunakan *Konsep Integrasi*

## 1. Konsep Integrasi Ekonomi

Konsep Integrasi ekonomi digunakan guna menganalisa kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di negara-negara di dunia termasuk negara-negara di Asia, yang membentuk forum kerjasama, dengan mengintegrasikan diri mereka kedalam forum organisasi tersebut. dibawah ini definisi dari konsep Integrasi.

Definisi konsep Integrasi menurut Ernest Haas adalah sebagai berikut:

“Proses dengan mana aktor-aktor politik di beberapa wilayah nasional yang berbeda terdorong untuk memindahkan kesetiaan, harapan dan kegiatan politik mereka ke suatu pusat baru yang lembaga-lembaganya memiliki atau menuntut yuridiksi atas Negara-negara nasional yang ada sebelumnya (Joseph Nye, *Peace in Paris, little, Brown, 1971*)”<sup>6</sup>

Suatu organisasi liberalisasi hubungan ekonomi antar negara merupakan dasar utama dari integrasi ekonomi. Hubungan ini sama artinya dengan memperluas pasar domestik masing-masing negara yang terlibat. Perluasan pasar diharapkan akan mendorong ekonomi berskala besar yang bisa meningkatkan efisiensi produksi dan dengan demikian bisa menghasilkan barang dan jasa murah hasil dari proses produksi yang berwujud peningkatan kemakmuran masyarakat negara-negara yang terlibat dalam integrasi ekonomi tersebut dianggap merupakan basis kuat penciptaan dan pemeliharaan perdamaian .

*“Economic integration as a process and state of affairs. Regarded as a process, it encompasses measure designed to abolish discrimination between economic units belonging to different national state: viewed as a state of affairs, it can be*

---

<sup>6</sup> Mohtar Mas' oed, *op.cit*, Hal 153



*represented by the absence of various forms of discrimination between national economics”<sup>7</sup>*

Dari teks asli diatas dapat diterjemahkan bahwa integrasi ekonomi adalah sebagai suatu proses dan keadaan. Dianggap sebagai suatu proses, integrasi ekonomi meliputi bentuk indikasi untuk menghapus diskriminasi antara ekonomi nasional bisa diwakili oleh ketiadaan bentuk-bentuk variasi diskriminasi antar ekonomi nasional.

Integrasi ekonomi di kawasan tertentu akan menghasilkan empat manfaat pokok yaitu:

- a. Menstimilir eksistensi dan ekspansi industri manufaktur dengan basis yang lebih rasional.
- b. Meningkatkan manfaat perdagangan (*gain from trade*) yang bisa pula diartikan sebagai perbaikan dasar pertukaran perdagangan (*term of trade*) pada kelompok tersebut.
- c. Meningkatkan posisi tawar-menawar (*bargaining*) terhadap kekuatan-kekuatan ekonomi lain.
- d. Menimbulkan persaingan yang semakin intensif sehingga menaikkan tingkat efisiensi.

Integrasi ekonomi dapat bersifat institusional dan fungsional. Bersifat institusional apabila integrasi ekonomi dilansir oleh otoritas politik, yaitu yang didasarkan atas suatu kesepakatan formal. Sedangkan yang bersifat fungsional yaitu proses integrasi ekonomi secara lebih “alamiah“ dan terjadi karena

peningkatan saling ketergantungan ekonomi. Proses ini lebih digerakkan oleh pertimbangan ekonomi dari para pelaku ekonomi yang bersangkutan. Otoritas politik (negara, pemerintah) yang bersangkutan dapat menghambat proses integrasi ekonomi, tetapi juga dapat semakin mendorong proses integrasi. Dengan demikian untuk mengelola saling ketergantungan ekonomi tersebut harus dibentuk mekanisme kerjasama agar dapat terhindar dari konflik untuk mengatasi persengketaan yang timbul.

Proses integrasi ekonomi regional cenderung melalui beberapa tahap, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih, yaitu:

1. Tahap yang paling sederhana adalah *Free Trade Area* (FTA). Dalam *Free Trade Area*, semua pembatasan jumlah dan hambatan tarif atas ekspor dan impor barang dihapuskan, sedangkan masing-masing negara anggota masih menjadi bebas.
2. Tahap yang kedua adalah *Custom Union*. Dalam tahap ini, selain pengaturan FTA, adalah bahwa semua negara anggota menggunakan tarif dan non tarif yang sama terhadap bukan anggota. Jadi, pada tahap ini ada aliran barang antar anggota dengan bebas, tetapi terhadap pihak luar atau non anggota dikenakan bea masuk yang sama.
3. Tahap ketiga adalah common market atau pasar bersama. Dalam tahap ini disamping kebebasan yang ada pada FTA dan *Custom Union*, ada kebebasan aliran faktor produksi tenaga kerja, modal, kebebasan aliran faktor produksi tenaga kerja modal, bahan mentah, dan lain-lain. Dengan kata lain, semua hambatan atas aliran faktor produksi dihapuskan.

4. Tahap keempat adalah *Economics Union*. Dalam tahap ini, disamping kebebasan yang ada pada ketiga tahap sebelumnya ada tambahan lain, yaitu harmonisasi atau kebijaksanaan ekonomi dan sosial.
5. Tahap terakhir adalah *Supranation Union*. Dalam tahap ini semua negara anggota menyerahkan kedaulatan atas bidang ekonomi politik dan sosial kepada penguasa (*authority*) tertinggi yang diangkat bersama.

Karena integrasi ekonomi melibatkan proses pengurangan tingkat hambatan perdagangan antar negara anggota. Proses itu umumnya dianggap mengarah ke perdagangan bebas. Tetapi sebenarnya proses itu sepenuhnya tidak mengarah ke perdagangan bebas karena negara-negara anggota kerjasama itu masih mengenakan pembatasan terhadap impor dari negara bukan anggota dalam perdagangan bebas. Dengan demikian jelas bahwa gerakan kearah integrasi ekonomi sekelompok negara akan memberikan kemampuan kepada negara-negara anggotanya untuk bersaing dengan negara-negara yang bukan anggota dalam perdagangan di wilayah negara-negara anggota kerjasama tersebut. Artinya impor barang dari sesama negara anggota akan lebih murah dari pada impor barang yang sama dari negara bukan anggota. Akibat dari kebijaksanaan tarif yang diskriminatif ini yaitu memberikan perlakuan istimewa pada negara anggota adalah peningkatan perdagangan antar anggota kerjasama dan penurunan neraca perdagangan dengan negara bukan anggota. Karena pengurangan atau penghapusan tarif atau bea masuk mempunyai arti sebagai penurunan harga barang, maka

Pengurangan atau penghapusan restriksi perdagangan diantara negara-negara anggota yang tergabung dalam EAC, seperti yang diterapkan dalam AFTA, akan memperkuat ekonomi negara anggotanya, sedangkan interdependensi ekonomi antar negara anggota akan menimbulkan kesamaan sikap atau kebijakan ekonomi. Karena itu, banyak keuntungan yang akan diperoleh apabila EAC terbentuk dan menjadi kenyataan.

## **2. Konsep Kerjasama Dan Organisasi Internasional**

Kehidupan bermasyarakat tidak bisa terlepas dari hubungan antar yang satu dengan yang lain nya, hubungan yang terjadi inilah yang biasa disebut dengan interaksi sendiri dapat merupakan suatu hubungan-hubungan sosial yang dinamis antara orang-perorangan, antar kelompok manusia, maupun antar kelompok manusia dengan orang-perorangan. hubungan interaksi juga dapat dilihat dalam hubungan antara negara yang selanjutnya dikenal sebagai hubungan internasional. Secara umum hubungan internasional yaitu interaksi antar aktor politik internasional yang melampaui batas wilayah yuridiksi suatu negara. Negara yaitu unit politik yang diidentifikasi menurut territorial, populasi dan otonomi wilayah dan penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnisnya.<sup>8</sup>

Hal ini dilakukan oleh suatu negara guna memenuhi kepentingan nasionalnya, mengacu pada pendapat, J. Frankel mengenai negara, yaitu sifat utama dari negara adalah negara merupakan bentuk tertinggi dari organisasi

---

<sup>8</sup> Theodore A. Coulobis & James wolfe, alih bahasa oleh Mercedes Marbun, Pengantar Hubungan Internasional, keadilan dan Power, Bandung, Alfabeta, 1990, hlm 5

manusia<sup>9</sup>. Sehingga negara dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang diciptakan dan disiapkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai tindakan yang direncanakan<sup>10</sup>.

Menurut Robert Mac Iver, Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa<sup>11</sup>

Sejalan dengan pesatnya perkembangan dunia internasional menyebabkan negara bukan lagi aktor dominan melainkan muncul aktor-aktor lain yang tidak kalah penting seperti Organisasi Internasional, Kelompok perorangan atau bahkan individu yang berpengaruh, kemudian mengadakan berbagai rangkaian aksi dan reaksi yang membentuk apa yang disebut "Hubungan Internasional".<sup>12</sup>

Organisasi Internasional yang keberadaannya sekarang semakin banyak baik yang beranggotakan pemerintah atau non-pemerintah, dapat didefinisikan sebagai:

"Pola kerjasama yang melintas batas-batas negara yang didasari struktur organisasai yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati

---

<sup>9</sup> J.Frankel, alih bahasa oleh dra. Leila H. Hasyim, *International Relations*, Jakarta, ANS Sungguh Bersaudara, 1980, hlm 99.

<sup>10</sup> Ibid hal 80.

<sup>11</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, 1985, hal 40.

bersama, baik antara pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah antar negara yang berbeda”.<sup>13</sup>

Setiap Organisasi Internasional dibentuk dalam rangka mencapai semua atau beberapa tujuan berikut:<sup>14</sup>

1. Regulasi Hubungan internasional terutama melalui teknik-teknik penyelesaian antar negara secara damai.
2. Meminimalkan atau paling tidak mengendalikan konflik atau perang internasional
3. Memajukan aktivitas-aktivitas kerjasama antar negara demi keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi dikawasan tertentu atau untuk manusia pada umumnya.
4. Pertahanan kolektif sekelompok negara untuk menghadapi ancaman eksternal.

Setelah melihat tujuan diatas, maka EAC dapat dikategorikan sebagai salah satu Organisasi Internasional yang dalam menjalankan tugasnya bertujuan untuk memajukan aktivitas-aktivitas kerjasama antar Organisasi Internasional dengan anggotanya sehingga dapat digunakan untuk pembangunan antar negara anggotanya demi keuntungan sosial ekonomi dikawasan Asia Timur.

Organisasi internasional itu sendiri dalam mencapai tujuannya harus menjalankan fungsinya sehingga tujuan tersebut tidak menyimpang dari yang ditetapkan oleh Organisasi Internasional itu, selain itu Organisasi

---

<sup>13</sup> Teuku May Rudi, Administrasi Dan Organisasi Internasional, PT Bandung , Pt Eresco , 1993, hal 3

<sup>14</sup> Theodore A. Coumbus & James Wolfe , *op.cit*, hal 279.

Internasional harus berfungsi bagi negara-negara anggotanya. Fungsi Organisasi Internasional menurut Le Roy Bennet adalah:<sup>15</sup>

1. *To provide the means of cooperation among states in areas in which corporation provides advantages for all or larger number of nations.*
2. *To provide multiple channels of communication among governments so that areas of accommodation maybe explored and easy access will be available when problems arise.*

Fungsi Organisasi Internasional tersebut diatas, sesuai dengan tujuan EAC yang menghendaki pendekatan kerjasama dalam satu kawasan guna memudahkan aktivitas perdagangan dikawasan Asia Timur dan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang muncul diantara negara anggotanya.

Peranan Organisasi Internasional dapat dibagi menjadi 3, yaitu:<sup>16</sup>

1. Instrumen, Organisasi Internasional umumnya dipahami sebagai alat negara untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya.
2. Arena, Organisasi Internasional berperan sebagai wadah atau forum yang melahirkan tindakan-tindakan.
3. Aktor, orgainsasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi oleh aktor-aktor lain (negara).

---

<sup>15</sup> Le Roy Bennet, *Internasional Organization: Principles and Issues*, Engelwood Cliffs, New Jersey, Pretince Hall, Inc, 1997, hal 3

<sup>16</sup> *Other Actor, International Organization: The Year Book of International Organization*

Menurut Fredich Kratochwil dan John Gerard Ruggie, peranan organisasi internasional adalah:<sup>17</sup>

1. *The emphasis was on the role of International Organization in the resolution substantive international problems.*
2. *Focus away from the solution of Substantive problems through perse, toward certain long term institusional concequence of the failure to solve substantive problems through the available institusional means.*
3. *Critique of the transformational expectations of integration theory and then shifted the focus un to a more general concern with how international institutions' reflect and to some extent magnify or modify' the charateristic featrure of intenational system.*

Dalam era globalisasi dan liberalisasi, frekuensi hubungan antar negara-negara menjadi semakin tinggi yang dikarenakan oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Interaksi tersebut menyebabkan terbetunknya suatu forum kerjasama antar negara baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan. Semakin banyaknya interaksi yang terjadi antar negara menunjukkan bahwa perlu adanya kerjasama, kerjasama itu nantinya dapat memenuhi kepentingan nasionalnya masing-masing.

Kerjasama antar negara mempunyai kedudukan yang sejajar dan menyangkut kesejahteraan masing-masing negara anggota yang mengadakan perjanjian baik itu bilateral maupun multilateral, atau demi

---

<sup>17</sup> Fredich Kratochwil & Edward D. *International Organization: A Reader*. Pennsylvania, New



tercapainya kepentingan nasional dari negara tersebut. dan menghindarkan dari konflik perang antar negara oleh karena itu perlu dibentuknya Organisasi Internasional yang juga sebagai wadah penghubung antar bangsa dan negara. Sedangkan untuk kerjasama negara dengan organisasi internasional, negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan mutlak atas warga negaranya, juga untuk mengatur kedaulatan yang penuh dan mutlak atas warga negara tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain.

Konsep tersebut diatas dinilai sesuai dengan semangat pembentukan EAC yang cenderung saling bekerjasama antara negara anggota satu dengan yang lainnya dalam membentuk suatu organisasi demi kepentingan yang sama. Oleh karena itulah penggunaan konsep tersebut diatas dapat membantu memberikan penjelasan terhadap pembentukan EAC.

## **F. Hipotesa**

Antisipasi dalam menghadapi forum EAC adalah dengan mengambil langkah-langkah kebijakan luar dan dalam negerinya seperti kebijakan perdagangan, investasi, sistem perpajakan dan ketenaga kerjaan.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam Penelitian ini yang berjudul "Antisipasi Indonesia Dalam Menghadapi East Asia Community", harus memiliki ruang lingkup yang pasti dan

... penelitian ini dibatasi dari tahun 1991-2005

## **H. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data ini akan dilakukan melalui studi pustaka. Oleh karena itu data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, majalah-majalah, surat kabar maupun dokumen-dokumen, laporan-laporan resmi baik yang akan diterbitkan atau tidak, dan browsing lewat internet serta sumber-sumber lain yang relevan yang dapat dijadikan sebagai acuan agar dapat membantu sebagai bahan kajian dalam penelitian ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan pembahasan, penulisan dan pemahaman terhadap pemikiran yang hendak diutarakan oleh penulis dalam tulisan ini, maka penulis perlu membuat sistematika penulisan yang terencana. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yaitu:

**BAB I:** Berisi tentang pendahuluan yang memuat tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada, kemudian membuat suatu hipotesa yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Berisi uraian tentang EAC yaitu menyangkut ide dasar pembentukan EAC tersebut serta bagaimana proses pembentukan EAC

**BAB III:** Berisi uraian tentang perbandingan ekonomi Indonesia dengan negara-